

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia perhatian *corporate governance* mulai muncul ketika pada tahun 1997-1998 Indonesia mengalami krisis ekonomi yang membuat keadaan perekonomian Indonesia menjadi terpuruk. Keterpurukan ekonomi Indonesia ditandai dengan merosotnya angka nilai tukar rupiah terhadap dolar sehingga menyebabkan banyak investor asing yang tidak mau menanamkan modalnya di Indonesia. Krisis tersebut juga menyebabkan para pemegang saham kehilangan nilai saham yang terus merosot karena keadaan perekonomian Indonesia yang terpuruk. Krisis ekonomi yang di alami Indonesia juga rasakan oleh negara-negara lain di Asia Timur dan Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang dan Korea. Lamanya proses perbaikan yang ada di dalam Indonesia disebabkan oleh masih kurang diterapkannya praktik *corporate governance* yang ada di Indonesia. Setelah kejadian itu maka pemerintah dan Investor mulai memberikan perhatian yang signifikan terhadap *corporate governance* (Wardhani, 2006).

Di Indonesia, isu terkait *corporate governance* sudah mulai banyak dibahas dalam dunia bisnis, sehingga banyak sumber-sumber *corporate governance* yang mulai diteliti di dalam perusahaan kemudian dikembangkan oleh lembaga peneliti *corporate governance*, salah satu informasi yang terkait dengan *corporate governance* saat ini yang dapat digunakan adalah *corporate governance perception index* (CGPI). Index CGPI adalah hasil penelitian dari sebuah lembaga

yang diselenggarakan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) bekerjasama dengan majalah SWA, dimana CGPI ini sudah dibuat sejak tahun 2001. *Corporate governance perception index* ini bertujuan untuk membuat pemeringkatan index terbaik dari setiap perusahaan yang telah menerapkan *corporate governance*. Pada saat ini sudah mulai banyak perusahaan-perusahaan yang ikut serta di dalam CGPI seperti perbankan, perusahaan publik, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Bank merupakan suatu lembaga yang berfungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Sebagai lembaga intermediasi, bank berperan penting dalam menghimpun dana dan menyalurkannya ke sector riil dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi (*Agent of Development*). Perbankan juga berperan sebagai lembaga penyelenggara dan penyedia layanan jasa-jasa di bidang keuangan serta lalu lintas system pembayaran (*Agent of Services*). Dengan demikian, bank telah menjadi lembaga yang turut berpengaruh dalam perkembangan perekonomian suatu negara. Dan perbankan harus mampu mempertahankan kinerjanya supaya dapat menjadi suatu industri yang sehat.

Bank sebagai lembaga yang mengemban fungsi intermediasi dihadapkan pada berbagai risiko usaha yang mesti dikelola agar mampu meminimalisir potensi kerugian. Oleh karena itu, Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan Sebagai pedoman manajemen risiko bank, seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/25/PBI/2009. Langkah ini diharapkan mampu mengontrol manajemen puncak

dan menumbuhkan budaya *prudential* dalam lingkungan internal bank (Otoritas Jasa Keuangan, 2014).

Pengambilan risiko dilatarbelakangi dengan adanya keinginan untuk mendapat keuntungan yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Tindakan ini mencerminkan suatu organisasi yang ingin memperoleh. Peluang yang ada dengan hasil akhir yaitu keuntungan atau kerugian.

Beberapa peneliti mengemukakan bahwa besarnya pengambilan risiko bank dipengaruhi oleh regulasi yang diterapkan pemerintah (Ongena dkk., 2013 dalam Gonzales & Fransisco, 2005). Regulasi sebagai bagian dari kontrol untuk menekan konflik keagenan diharapkan dapat mendorong bank bersikap hati-hati dalam pengambilan risiko (Taswan, 2012). Regulasi perbankan dalam penelitian ini difokuskan pada kebijakan *capital requirement* yang berfungsi sebagai *buffer* (penyangga) saat terjadi krisis yang mengganggu stabilitas sistem keuangan. Selain itu, disusunnya peraturan modal ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran mengenai jumlah modal yang dimiliki bank kurang dari tingkat relatif optimal terhadap risiko-risiko usaha yang dihadapi bank tersebut (Awdeh dkk., 2011).

Menurut FCGI (2003) Komisaris independen memikul tanggung jawab untuk mendorong secara proaktif agar komisaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas dan penasihat direksi dapat memastikan perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif (termasuk di dalamnya memantau jadwal, anggaran dan efektifitas strategi tersebut), memastikan perusahaan memiliki eksekutif dan manajer yang profesional, memastikan perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang bekerja dengan baik, memastikan perusahaan

mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya, memastikan resiko dan potensi krisis selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik serta memastikan prinsip-prinsip dan praktek *Good Corporate Governance* dipatuhi dan diterapkan dengan baik. Hasil studi yang dilakukan oleh Pathan (2009) menunjukkan bahwa hadirnya dewan komisaris dan komisaris independen akan memberi manfaat bagi menurunnya pengambilan resiko yang dilakukan manajemen bank. Hal ini ditandai dengan resiko spesifik dan resiko sistematis yang menurun serta nilai bank yang tetap stabil.

Keberadaan komisaris independen di Indonesia diatur dalam *Code of Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Jumlah komisaris independen harus mampu membuat pengawasan dalam perusahaan berjalan efektif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu anggota komisaris independen harus berlatar belakang akuntansi atau keuangan. Kehadiran komisaris independen dalam perusahaan diharapkan mampu meningkatkan pengawasan karena tidak berafiliasi dengan perusahaan sehingga bebas dalam pengambilan keputusan.

Dalam menjalankan kegiatan bisnis, suatu perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara perusahaan satu dengan yang lainnya. Namun perbedaan tersebut hanya terletak pada seberapa besar angka akuntansi dari masing-masing item dari karakteristik perusahaan. Ada beberapa item karakteristik perusahaan yang biasa penulis sebutkan dalam penelitiannya

diantaranya: kepemilikan institusional, profitabilitas, kesempatan tumbuh, dan ukuran perusahaan.

Jensen & Meckling (1976) menyatakan kepemilikan institusional adalah investor yang memiliki informasi utama dan mungkin mereka dapat bekerjasama dengan pemilik ekuitas dan penyedia utang yang mungkin dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajer supaya manajer bisa bekerja dengan sebaik mungkin untuk kepentingan perusahaan dan memaksimalkan nilai perusahaan. Kepemilikan oleh institusional investor sebagai monitoring manajemen mempunyai arti yang sangat penting. Karena kepemilikan mewakili sumber kekuasaan yang bisa digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap keberadaan manajemen. Dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan secara optimal. Maka semakin besar saham yang dimiliki oleh institusional investor akan menyebabkan usaha monitoring menjadi semakin efektif, karena dapat mengendalikan perilaku oportunistik yang dilakukan oleh para manajer (Indahningrum & Handayani, 2009).

Profitabilitas (rentabilitas) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas merupakan hasil akhir dari sejumlah kebijaksanaan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan dalam hal menunjukkan kombinasi efek dari likuiditas, manajemen aktiva, dan utang pada hasil operasi. Kartikasari (2007) menyatakan bahwa profitabilitas itu mengukur efektifitas manajemen secara keseluruhan sebagaimana ditunjukkan dari keuntungan yang diperoleh dari penjualan dan investasinya. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan menunjukkan semakin

besar perusahaan mampu memberikan return, sehingga permintaan atas saham perusahaan juga tinggi (Wibowo & Sudarno, 2013). Tingginya return saham dalam perusahaan yang dapat mengindikasikan tingginya *risk-taking behavior* investor terhadap saham tersebut.

Pertumbuhan penjualan mencerminkan manifestasi keberhasilan investasi pada masa lalu dan bisa dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang. Pertumbuhan penjualan juga merupakan indikator permintaan dan daya saing perusahaan dalam suatu industri. Laju pertumbuhan suatu perusahaan akan mempengaruhi kemampuan perusahaan mempertahankan keuntungan dalam mendanai kesempatan-kesempatan pada masa yang akan datang (Barton, et al, 1989).

Besar kecilnya perusahaan dapat dilihat dari total aktiva (asset) dan total penjualan (net sales) yang dimiliki oleh perusahaan. Dari beberapa penelitian menggunakan ukuran aktiva sebagai ukuran perusahaan (Kusumawardhani, 2012). Rohman & Utama (2013) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki aktiva yang besar menunjukkan perusahaan tersebut sudah mencapai tingkat kemapanan. Ketika suatu perusahaan dinilai memiliki aktiva yang besar akan memunculkan pandangan bagi investor bahwa berinvestasi di perusahaan dengan tingkat aktiva besar memiliki risiko yang lebih kecil sehingga banyak investor yang ingin berinvestasi di perusahaan tersebut. Semakin banyaknya permintaan saham perusahaan maka akan membuat fluktuasi return saham ikut bergerak naik.

1.2. Ruang Lingkup

Penelitian ini sifatnya kuantitatif, dimana variabel bebasnya adalah komisaris independen, kepemilikan institusional, profitabilitas, kesempatan tumbuh, dan ukuran perusahaan. Dan variabel terikatnya Bank Risk Taking. Objek penelitiannya adalah perbankan yang terdaftar di BEI pada periode 2013 sampai 2017.

1.3. Rumusan Masalah

Dari beberapa pemaparan tentang latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh antara komisaris independen terhadap bank risk taking pada bank yang terdaftar di BEI pada periode 2013 sampai 2017 ?
2. Apakah terdapat pengaruh antara kepemilikan institusional terhadap bank risk taking pada bank yang terdaftar di BEI pada periode 2013 sampai 2017 ?
3. Apakah terdapat pengaruh antara profitabilitas terhadap bank risk taking pada bank yang terdaftar di BEI pada periode 2013 sampai 2017 ?
4. Apakah terdapat pengaruh antara kesempatan tumbuh terhadap bank risk taking pada bank yang terdaftar di BEI pada periode 2013 sampai 2017 ?
5. Apakah terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap bank risk taking pada bank yang terdaftar di BEI pada periode 2013 sampai 2017 ?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris yaitu mengenai:

1. Mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap bank risk taking.
2. Mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap bank risk taking.
3. Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap bank risk taking.
4. Mengetahui pengaruh kesempatan tumbuh terhadap bank risk taking.
5. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap bank risk taking.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini akan memberikan bukti empiris tentang bank risk taking dan mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi pembaca dan juga peneliti.

2. Manfaat Praktikal

Penelitian ini akan memberikan manfaat praktis bagi :

1. Bagi Peneliti

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan literatur dalam bidang ilmu ekonomi dan bisnis.
- b. Untuk menambah pengetahuan yang dapat digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya.

2. Bagi pihak yang berkepentingan

Dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan mengenai tingkat keuntungan perbankan.

3. Manfaat Organisasional

Penelitian ini memberikan manfaat bagi pihak perbankan berkaitan dengan pengambilan risiko bank untuk mengetahui perolehan keuntungan yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan bank.

